

DINAMIKA EKONOMI INDONESIA ERA REFORMASI: PERUBAHAN, TANTANGAN DAN PROSPEK MASA DEPAN

Qonita Mayla Hadi¹, Sabrina Salsabila², Riyan Hidayat Hidayat³, Mandha Eko Ribawati Ribawati⁴

Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Untirta, Jl. Ciwaru Raya, Serang Banten

Email: 2288230029@untirta.ac.id, 2288230030@untirta.ac.id, 2288230050@untirta.ac.id, eko.ribawati.@untirta.ac.id

ABSTRAK

Reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melibatkan fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberi dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun pengorganisasian yang baik. KBBI menjelaskan bahwa reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, agama atau suatu masyarakat maupun negara yang di garis besarkan bahwa reformasi dapat di artikan sebagai pembaharuan. Dalam sejarah Indonesia, reformasi adalah istilah yang kerap di asumsikan sebagai era setelah pemerintahan Soeharto yang berlangsung pada tahun 1998 yang membuat adanya perubahan besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat saat itu. Reformasi ekonomi sebagai realisasi tindakan yang direncanakan untuk mengatasi krisis. Dengan melakukan perubahan yang memiliki orientasi anti-resesi dan akibatnya diposisikan pada periode waktu tertentu. Penulisan ini di susun dengan menggunakan pendekatan historis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika ekonomi indonesia era reformasi dengan menggunakan metode heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Kata kunci: era reformasi, ekonomi

ABSTRACT

Reform is an effort by the government or individuals to make changes to an agency or institution in an environment by involving phenomena that have occurred previously and which are felt to have no significant impact on improving the welfare of members through a good governance or organizational system. The KBBI explains that reform is a drastic change for improvement in the social, political, religious or social or state fields, which outlines that reform can be interpreted as renewal. In Indonesian history, reform is a term that is often assumed to refer to the era after the Soeharto government which took place in 1998 which made major changes in various areas of people's lives at that time. Economic reform as the realization of planned actions to overcome the crisis. By making changes that have an anti-recession orientation and are consequently positioned for a certain time period. This writing was prepared using a historical approach which aims to describe the dynamics of the Indonesian economy in the reform era using heuristic methods, source criticism, interpretation and historiography.

Key words: reform era, economy

PENDAHULUAN

Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama ke catatan kehidupan baru yang lebih baik. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi, selain beberapa peristiwa terkait lainnya bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. KBBi menjelaskan bahwa reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan baik di bidang sosial, politik, agama atau suatu masyarakat maupun negara yang di garis besarkan bahwa reformasi dapat di artikan sebagai pembaharuan. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan melakukan perubahan dan pembaharuan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial (Pandji, 2008). Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako) seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Pengertian ekonomi menurut (Samuelson, 2012) menyatakan bahwa pengertian ekonomi adalah suatu Cara yang di pakai oleh seseorang atau kumpulan orang dalam memanfaatkan sumber- sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai macam komoditi dan produk serta menyalurkannya supaya dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti, bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prasjojo (Prasjojo, 2009) mengemukakan bahwa reformasi merujuk pada upaya yang dikehendaki (intended change), dalam suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah, oleh karena itu persyaratan keberhasilan reformasi adalah eksistensi peta jalan (road map), menuju suatu kondisi, status dan tujuan yang ditetapkan sejak awal beserta indikator keberhasilannya. Menurut Samuel P. Huntington (1968: 344) reformasi merupakan perubahan yang dilakukan dengan cakupan yang terbatas dan dalam waktu yang tidak cepat maupun lambat (moderate), dalam rangka mengubah kepemimpinan, kebijakan dan institusi-institusi politik. Berbicara mengenai konsep reformasi berarti berbicara tentang tujuan perubahan yang diinginkan juga cakupan dan tingkat perubahannya. Tujuan perubahan yang ingin dicapai bermaksud untuk mewujudkan kesetaraan baik sosial maupun ekonomi masyarakat, hal ini juga berpengaruh pada sesuatu yang baik demi kelangsungan sistem politik yang menjamin suatu negara. Reformasi tidak akan berjalan kalau bukan karena terjadi suatu masalah atau hal lain yang dianggap kurang tepat diterapkan dalam suatu negara.

Penelitian tentang galami perubahan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kami dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada periode ini, seperti kebijakan moneter, stabilitas politik, dan investasi. Reformasi Struktural : Tahap reformasi melibatkan perubahan sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya. kami dapat mengkaji upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi struktural seperti deregulasi, privatisasi, dan perbaikan tata kelola. Ketimpangan ekonomi: Ketimpangan ekonomi menjadi isu yang relevan di era reformasi. kami dapat mempelajari tentang ketimpangan pendapatan, distribusi sumber daya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sektor industri dan peran penanaman modal asing: Analisis mengenai perkembangan sektor industri pada masa reformasi dan peran penanaman modal asing dalam pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Moneter dan Fiskal: Pelajari tentang kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan selama periode reformasi .

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode heuristik yaitu mengumpulkan sumber informasi kemudian melakukan kritik dan interpretasi.

HASIL PENELITIAN

Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998 pada era B.J. Habibie didukung oleh militer dan disebabkan oleh faktor eksternal, bukan akibat langsung dari perubahan sosial ekonomi internal

akibat pertumbuhan ekonomi. Krisis keuangan dimulai di Thailand pada bulan Juli 1997, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhenti. Pada pertengahan tahun 1990-an, Indonesia sering disebut sebagai "kisah sukses" di antara negara-negara berkembang, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7% dan pendapatan per kapita sebesar \$1.000. Hasilnya, Indonesia menjadi negara yang termasuk dalam kategori "NIC//Negara yang mendekati industrialisasi berkembang".

Kehidupan Ekonomi Indonesia disetiap era pemerintah pada masa Reformasi :

1. Era BJ. Habibie

Presiden BJ Habibie merupakan presiden pertama era reformasi. Setelah mengundurkan diri, jabatan presiden diambil alih oleh Bakardin Yusuf Habibi yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Politik di bidang ekonomi juga mengalami perubahan. Dalam hal ini, B.J. Habibie mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Situasi ekonomi sedang bergejolak, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Di bidang perekonomian, Presiden Habibie mempunyai tiga program: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan program jangka pendek adalah untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Beberapa program menjadi agendanya, seperti Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang merespon kebutuhan pokok masyarakat dan pengendalian harga. Dalam rencana jangka menengah, akan dilakukan upaya pemulihan sistem perbankan guna memulihkan kepercayaan dan aktivitas dunia usaha, khususnya investor asing. Presiden BJ Habibie juga melaksanakan berbagai inisiatif reformasi struktural untuk mengendalikan laju inflasi dan memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui peningkatan efisiensi dan daya saing. Sedangkan program jangka panjang fokus pada fundamental perekonomian yang progresif, modern, mandiri dan berkualitas serta terbuka untuk semua kalangan. Hal ini termasuk membangun institusi ekonomi yang fokus pada pasar domestik dan global. Pada masa kepemimpinan Presiden Habibie, dilakukan upaya-upaya politik yang sangat bermanfaat bagi Indonesia pada tahap awal reformasi. Upaya pengendalian perekonomian meliputi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan korporasi, dan kebijakan perbankan. Di sektor keuangan, pemerintah menaikkan suku bunga surat berharga Bank Indonesia menjadi 70 persen dan membentuk bank sentral yang independen untuk mengendalikan peredaran uang. Di bidang pajak, beberapa proyek infrastruktur dibatalkan, mobil nasional mendapat perlakuan khusus, dan program JPS mendapat pendanaan. Sektor korporasi telah dirombak. Utang swasta direstrukturisasi melalui Badan Restrukturisasi Utang Indonesia (INDRA) dan Program Inisiatif Jakarta. dan mengakhiri praktik monopoli yang sebelumnya dilakukan oleh Blog dan Pertamina. Selain itu, sektor perbankan juga tidak kebal terhadap perubahan. Sebanyak Rp650 triliun obligasi digunakan untuk dana talangan perbankan, dengan rincian 38 bank ditutup dan tujuh bank diakuisisi. Satu tahun kemudian, inisiatif kebijakan ekonomi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, meningkat sebesar \$4,444 dari -13 persen menjadi 2 persen. Hal ini juga berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 77,6% menjadi 2%.

Setelah era B.J. Habibie, tampuk kepresidenan berada di tangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebelumnya, kondisi perekonomian negara Indonesia dinilai telah stabil, tetapi Gus Dur bersama kabinetnya menolak melanjutkan pemerintahan Habibie. Pemerintahan Habibie, yang menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan, oleh Gus Dur dijadikan kementerian nonportfolio atau menteri negara non-departemen. Hal ini merupakan pembuktian Gus Dur pada dunia bahwa bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana IMF (International Monetary Fund). Sebab, selama masa pemerintahan Gus Dur, IMF tidak pernah mencairkan dana untuk Indonesia. Pemerintahan Gus Dur juga memiliki gagasan sekritisasi aset negara, terutama barang tambang. Kemudian, pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan di pasar modal untuk membiayai pembangunan nasional.

2. Era Megawati Soekarno Putri

Gus Dur yang dilengserkan pada 2001, kemudian digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, kondisi ekonomi Indonesia masih dalam keadaan krisis. Hal ini disebabkan situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Presiden Megawati dalam bidang ekonomi di antaranya seperti memutuskan hubungan dengan IMF; melakukan restrukturisasi dan reformasi keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan; meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah, serta kerjasama ekonomi dan politik di luar Amerika. Selama masa pemerintahan Megawati, sejumlah indikator ekonomi makro tampak menunjukkan tanda-tanda membaik. Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang terpuruk lima tahun sebelumnya.

3. Era Susilo Bambang Yudhoyono

Setelah Presiden Megawati, pada 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik menjadi presiden melalui Pemilu. Pada masa pemerintahannya, kehidupan perekonomian Indonesia bertumbuh secara positif. Pada 2004 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen, yang kemudian pada 2007 mencapai 6,3 persen. Namun, akibat adanya krisis keuangan global pada 2007, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup lambat, hanya tumbuh 4,6 persen pada tahun 2009. Pendapatan Domestik Bruto (PDP) Indonesia juga terus mengalami peningkatan pada era SBY, yaitu naik lebih dari tiga kali lipat, dari Rp10,5 juta pada tahun 2005 hingga mencapai Rp33,7 Juta pada tahun 2012.

A. Berikut faktor yang menentukan kesuksesan pelaksanaan reformasi ekonomi di Indonesia setelah krisis 1997:

Pertama, peran IMF sangat penting dalam meletakkan dasar bagi reformasi makroekonomi yang berhasil, serta untuk memastikan bahwa reformasi tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Amandemen UU tentang Bank Indonesia, serta disahkannya UU Keuangan Negara merupakan dua langkah reformasi utama selama periode Megawati, yang sangat mendukung bagi terciptanya stabilitas makroekonomi di masa ini. Kedua, pelaksanaan reformasi ekonomi biasanya menjadi sulit ketika harus melibatkan kepentingan publik atau sentimen nasionalistik yang kuat. Pengalaman dalam hal privatisasi, pembatalan amandemen UU Kelistrikan, penghapusan subsidi BBM yang terus tertunda, serta panjangnya proses penyusunan rancangan regulasi atau UU di DPR, jelas mengindikasikan hal tersebut. MacIntyre dan Resosudarmo (2003) menjelaskan bahwa proses penyusunan legislasi yang panjang di DPR mencerminkan perubahan fundamental dalam struktur politik Indonesia setelah krisis, di mana terjadi peralihan kekuasaan yang signifikan dari presiden kepada DPR. Akibatnya, sejumlah reformasi kebijakan yang besar tidak lagi dapat dilakukan secara cepat, sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Tidak akan terjadi reformasi yang signifikan sebelum tercapainya persetujuan antara pemerintah dengan DPR. Ketiga, dalam banyak hal, reformasi ekonomi yang kurang berhasil dapat disebabkan oleh tidak adanya institusi pendukung yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan reformasi tersebut, atau sejumlah reformasi turunannya. Akibatnya, upaya reformasi seringkali menjadi kurang efektif dan menimbulkan ketidakpastian. Keempat, reformasi ekonomi seringkali melibatkan permasalahan koordinasi yang cukup signifikan. Salah satu penyebab utama dari lambat dan kurang efektifnya implementasi kebijakan reformasi adalah bahwa proses pengambilan kebijakan menjadi jauh lebih terfragmentasi setelah era Soeharto. Selain itu, proses pengambilan kebijakan pasca-Soeharto – terutama pada periode SBY – lebih merupakan kombinasi dari kurangnya sumber daya serta pengalaman best practice dari pendorong/perancang reformasi, dengan adanya kecenderungan memburu rente dari pihak yang bertanggung jawab melaksanakan reformasi tersebut di lapangan.

A. Perjalanan ekonomi Indonesia setelah 20 tahun reformasi

Perjalanan ekonomi Indonesia setelah 20 tahun reformasi tidaklah mulus, ada hambatan dan tantangan, namun berbagai upaya harus dilakukan guna memperkuat strukturnya. Pada akhir 2008, ekonomi Indonesia terimbas oleh krisis global. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen sampai dengan triwulan III-2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada triwulan IV-2008. Hal itu tercermin pada perlambatan ekonomi secara signifikan terutama karena anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan. Secara relatif, posisi Indonesia sendiri secara umum bukanlah yang terburuk di antara Negara-negara lain. Perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 6,1 persen pada 2008. Sementara kondisi fundamental dari sektor eksternal, fisik dan industri perbankan juga cukup kuat untuk menahan terpaan krisis global. Meski demikian, dalam perjalanan waktu kedepan, dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia semakin terasa. Semakin terintegrasinya perekonomian global dan bertambah dalamnya krisis menyebabkan perekonomian di seluruh negara mengalami perlambatan pada tahun 2009 Indonesia tak terkecuali. Badan pusat statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 hanya mencapai 4,5 persen sebagai dampak perlambatan ekonomi global. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada 2014 tercatat sebesar 5,02 persen, tahun 2015 sebesar 4,88 persen, 2016 sebesar 5,02 persen tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi selama triwulan pertama 2018 mencapai 5,06 persen. Menteri Keuangan mengingatkan pentingnya penguatan struktur ekonomi dengan mendorong peran investasi maupun ekspor untuk optimalisasi pertumbuhan ekonomi. Membuat struktur ekonomi jauh lebih kuat, dengan menciptakan industri yang bisa memproduksi bahan baku dan bahan modal. Kinerja investasi yang saat ini sedang tumbuh tinggi atau mencapai 7,95 persen pada triwulan I-2018 harus di tingkatkan agar makin berkontribusi kepada perekonomian. Sedangkan sektor ekspor yang tumbuh 6,17 persen, atau hanya setengah dari impor yang tumbuh 12,75 persen pada periode sama, harus mulai diperkuat untuk memperkecil defisit neraca transaksi berjalan. Menteri Keuangan menambahkan tentang ekspor Indonesia baru separuhnya dari impor, dan ini akan jadi salah satu penghambat, apabila kita ingin tumbuh tinggi maka ekspor kita harus dipacu. Karena itu adalah cara untuk menyelesaikan dan meng-adress isu yang sifatnya struktural.

Untuk itu, pemerintah akan kembali memperkuat kebijakan untuk mendorong kinerja investasi maupun ekspor, salah satunya dengan perumusan insentif fisik, agar fundamental ekonomi makin terjaga. Kepala BPS mengatakan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2018 tumbuh sebesar 5,06 persen (yoy), lebih menjanjikan daripada periode sama tahun 2017 yang hanya tercatat 5,01 persen. Ini sangat menjanjikan karena lebih tinggi dari triwulan satu 2017 sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 itu juga lebih baik dari periode sama tahun 2016 yang hanya tumbuh sebesar 4,94 persen dan 2015 sebesar 4,83 persen. Berharap pertumbuhan akan lebih tinggi lagi karena masih ada momen yang bisa memicu pertumbuhan seperti Lebaran, Pilkada maupun Asian Games.

Pertumbuhan PDB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan I-2018 terjadi pada sektor informasi dan komunikasi 8,69 persen, transportasi dan pergudangan 8,59 persen, jasa lainnya 8,42 persen, jasa perusahaan 8,04 persen dan konstruksi 7,35 persen. Konstruksi, yang menjadi penyumbang struktur PDB terbesar keempat, tumbuh menggembirakan 7,35 persen. Ini jauh lebih tinggi dari triwulan satu 2017 yang hanya tumbuh 5,96 persen. Sedangkan menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,95 persen, konsumsi.

Masyarakat Indonesia mengalami beberapa tantangan khususnya di bidang ekonomi pada masa reformasi yang akhirnya membuat banyak kebijakan oleh pemerintah. Meskipun pada saat itu ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat masih besar. Hal ini menciptakan disparitas sosial yang mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang. Ekonomi Indonesia masih cenderung bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak, gas alam, dan produk pertanian. Ini mengekspos negara terhadap fluktuasi harga global dan menghambat diversifikasi ekonomi. Meskipun ada peningkatan signifikan, infrastruktur di Indonesia masih belum

memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penghambat bagi investasi dan pertumbuhan sektor-sektor non-pertanian. Masalah kualitas tenaga kerja dan kesenjangan keterampilan menjadi tantangan besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pendidikan dan pelatihan harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin kompleks.

Pemerintah tentunya melakukan strategi untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa reformasi. Hantaman krisis moneter pada tahun 1997 berdampak besar pada kehidupan ekonomi Indonesia. Tahun 1998 menjadi titik terendah kondisi perekonomian Indonesia. Krisis moneter bertransformasi menjadi krisis ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi (mencapai 77 persen di tahun 1998), laju pertumbuhan ekonomi yang rendah, nilai tukar rupiah yang sangat tinggi terhadap Dollar Amerika, serta tingginya angka pengangguran sehingga berakibat rendahnya daya beli. Periode tahun 1999 hingga 2004 menjadi tahun-tahun kritis yang menentukan nasib Indonesia, apakah bangkrut atau tetap eksis. Strategi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi meliputi kebijakan moneter, melakukan likuidasi perbankan, pembentukan dewan ekonomi nasional, paket ekonomi restrukturisasi keuangan, peningkatan investasi, dan penyelesaian masalah pengangguran. Berbagai strategi ini membuahkan hasil yaitu secara perlahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.

KESIMPULAN

Reformasi ekonomi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 di masa pemerintahan B.J. Habibie, yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, khususnya krisis keuangan Asia yang bermula dari Thailand pada Juli 1997. Krisis ini menghentikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sebelumnya telah mencapai rata-rata 7 persen per tahun dengan pendapatan per kapita sekitar US\$1.000. Indonesia, yang saat itu dianggap sebagai "cerita sukses" negara berkembang, berada dalam kondisi yang rentan ketika krisis melanda. Habibie menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang mencakup program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengurangi beban masyarakat, menyehatkan sistem perbankan, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, serta restrukturisasi utang swasta dan reformasi perbankan, berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari -13 persen menjadi 2 persen dalam setahun. Gus Dur melanjutkan upaya stabilisasi ekonomi dengan menolak bantuan dana dari IMF dan memfokuskan pada sekuritisasi aset negara. Namun, masa pemerintahannya ditandai oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Megawati melanjutkan reformasi ekonomi dengan memutuskan hubungan dengan IMF, melakukan restrukturisasi dan reformasi keuangan, serta mendorong usaha kecil dan menengah. Masa pemerintahannya melihat indikator ekonomi makro yang mulai membaik. SBY membawa pertumbuhan ekonomi yang positif dengan PDB meningkat lebih dari tiga kali lipat dari 2005 hingga 2012. Namun, krisis keuangan global 2007 memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga hanya mencapai 4,6 persen pada 2009. Terdapat juga faktor-faktor penentu kesuksesan keformasi peran IMF dalam menegakkan dasar reformasi makroekonomi yang tepat sasaran. Kesulitan melibatkan kepentingan publik dan nasionalisme dalam reformasi ekonomi. Kurangnya institusi pendukung untuk implementasi reformasi. Fragmentasi proses pengambilan kebijakan setelah era Soeharto. Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketergantungan pada ekspor komoditas, infrastruktur yang belum memadai, dan ketimpangan pendapatan. Namun, pemerintah berusaha mengatasi ini melalui kebijakan moneter, restrukturisasi perbankan, peningkatan investasi, dan penyelesaian masalah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,06 persen pada triwulan I-2018, menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun masih menghadapi hambatan signifikan. Reformasi ekonomi Indonesia setelah krisis 1997 membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dan kebijakan publik. Meskipun ada tantangan besar, berbagai kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah dari masa ke masa berhasil mengarahkan Indonesia menuju stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Sindoro

CENDIKIA PENDIDIKAN

ISSN: 3025-6488

Vol.5 No 6 Tahun 2024

1-10

Prefix DOI : doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317

|

DAFTAR PUSTAKA

- Layna Kamilah Fachrunnisa, Laely Armiyati, Iyus Jayusman, Estoria: Journal of Social Science and Humanities 4 (1), 494-513, 2023, Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999–2004).Ekbangsetda, 28 januari 2019, Reformasi 20 Tahun dan Struktur Ekonomi Indonesia.
- AswicaHyono, Haryo, and David Christian. "Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016." Centre for Strategic and International Studies 2 (2017): 1-16.
- khsan Sirot & Hamdan Tri Atmaja, Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Semarang -Indonesia, 2020.
- Maria Winda Klaudia, Ida Bagus Nyoman Wartha, Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, "PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA AWAL REFORMASI TAHUN 1998-1999".
- Syufa'at, dosen Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA ERA REFORMASI.
- Salsa Adelia Fertasari, Arief Musadad, Isawati, DAMPAK SOSIAL DAN POLITIK REFORMASI EKONOMI ERA DENG XIAOPING TAHUN 1978.
- Andi Ika Fahrika, SE.M.Si, Zulkifli, S.Pd.M.Si., PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA.
- Risa Fajar Kusuma, Sejarah Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi Sejarah kehidupan ekonomi Indonesia pada masa reformasi setelah lengsernya Soeharto era Orde Baru.
- David Christian, August 2017, Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016 Haryo AswicaHyono.

Sindoro

CENDIKIA PENDIDIKAN

ISSN: 3025-6488

Vol.5 No 6 Tahun 2024

1-10

Prefix DOI : doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317